

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Intensitas penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di instansi pemerintah terus meningkat. Salah satu komponen yang penting adalah pengelolaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Keberhasilan sistem informasi selain diukur melalui efisiensi dalam hal meminimalkan biaya, waktu, dan penggunaan sumber daya, juga harus diukur dengan efektivitas teknologi informasi dalam mendukung strategi organisasi¹. Hal tersebut membuat teknologi, informasi dan komunikasi menjadi bagian yang sangat penting. Teknologi Informasi dan Komunikasi juga merupakan pendukung dalam pengambilan keputusan yang keseluruhannya bertujuan untuk mendukung tujuan atau visi misi organisasi.²

Sejalan dengan jiwa *E-Government* yakni suatu usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan³. Pemerintah elektronik atau *e-government* (berasal dari bahasa inggris *electronics government* atau disebut juga *e-gov*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan.

¹Simarmata, Janner. 2006. *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal 58

²Jurnal Teknik dan Komputer, Vol. 1 No. 4, 2012.

³Indrajit. 2005. *Strategi manajemen pembelian dan Supply Chain*. Jakarta: Grafindo. Hal 58

Menurut Yu-Che dan James Perry, *e-government* adalah sebuah garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung, serta menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, pelaku bisnis, unit-unit pemerintah dan organisasi sektor ketiga⁴. Secara umum bahwa *e-government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara berorientasi pada pelayanan masyarakat. Karena perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dewasa ini memaksa semua unit organisasi termasuk juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diseluruh wilayah Indonesia harus menggunakan teknologi ini dalam kesehariannya.

Tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* membuat setiap institusi pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem yang telah ada⁵. Perbaikan tersebut sebagian tertuang dalam bentuk kebijakan. Salah satu contohnya adalah adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik⁶. Peraturan tersebut membuat fungsi manajemen dalam organisasi menjadi sangat penting di mana manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

⁴Chen, Yu-Che dan James Perry. 2003. *Outsourcing For E- Government: Managing For Success*, dalam *Public Performance & Management Review*, Vol. 26, No. 4.

⁵Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan⁷. Khusus menyangkut kebijakan tata kelola, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Aturan ini berdasarkan peruntukannya ditujukan bagi seluruh instansi pemerintah di semua level yakni kementerian atau LPND di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota⁸.

Penerapan dan pemanfaatan TIK dalam sebuah organisasi harus didukung dengan tata kelola TIK yang baik, agar pemanfaatan TIK betul-betul efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Peraturan Menteri Kominfo No. 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional, yang dikeluarkan Kementerian

Komunikasi dan Informatika merupakan standar tata kelola yang resmi yang bisa dijadikan acuan setiap instansi pemerintah dalam menata kelola TIK di lingkungannya masing-masing. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Dinas Kominfo Provinsi NTT merupakan instansi yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Salah satu tugas dan fungsinya adalah penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi dan telematika. Saat ini, Dinas Kominfo Provinsi NTT memiliki tugas yang cukup berat karena selain penyelenggaraan dan

⁷Hasibuan, Malayu.2011. *Manajemen Dasar dan Pengertian Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.Hal 2

⁸Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia .No. 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

pengembangan sistem informasi di masyarakat, Dinas Kominfo juga bertanggungjawab terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang ada di Provinsi NTT. TIK yang bagus membutuhkan penerapan yang baik pula. Dalam pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik di instansi pemerintah dialami berbagai hambatan. Salah satu hambatan/tantangan yang mengemuka adalah aspek tata kelola. Kelemahan dalam kemampuan penatakelolaan yang baik menyebabkan penyelenggaraan sistem tidak maksimal dalam arti sesuai sasaran ,efektif dan efisien.

Tata Kelola Teknologi Informasi Komputer harus dilakukan secara efektif. Kondisi terkini di Diskominfo Provinsi NTT yakni belum adanya peraturan dan kebijakan TIK yang menyebabkan terciptanya proses pengembangan dan pengelolaan TIK yang tidak terarah. Harus ada kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam tata kelola TIK sehingga pengelolaan TIK dapat berjalan efektif, efisien dan memberi manfaat optimal bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini harus dipatuhi dan dipahami oleh seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini, akan ditelusuri bagaimana penerapan pengembangan Sistem Tata Kelola TIK di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di dalam lingkup Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut: ‘Bagaimanakah Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di dalam lingkup Bidang *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur’?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan tata kelola TIK yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran ilmiah bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian sejenis dan dapat menambah wawasan yang lebih luas.
- Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.